

IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) SKALA KECIL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Amanda Syifa Widiyanti¹, Teguh Yuwono²

INTISARI

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan. Peraturan SVLK telah mengalami delapan kali perubahan sejak tahun 2009 yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Industri skala kecil sebagai salah satu sasaran kebijakan, masih mengalami kendala dalam implementasi SVLK. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi penghasil kayu rakyat dengan banyak industri pengolahan kayu. Namun, jumlah implementasi SVLK pada industri skala kecil masih terbilang rendah. Kajian terkait implementasi SVLK dilakukan sebagai referensi dalam upaya perbaikan tata kelola hutan di DIY.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data-data pendukung yang didapatkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dihadapi industri skala kecil dan mengkaji terkait implementasi SVLK di DIY. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dilakukan untuk merumuskan strategi implementasi SVLK pada industri pemegang PBPHH dengan kapasitas kurang dari 2.000 m³/tahun di DIY.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SVLK pada industri skala kecil dipengaruhi oleh motivasi pelaku usaha dan pasar yang dimasuki. Industri skala kecil memiliki usaha yang fluktuatif, sehingga masih menghadapi kendala dari segi ekonomi. Pelaku usaha perlu melakukan produksi secara efisien untuk dapat melakukan sertifikasi secara berkelanjutan. Pada tahun 2024, terdapat 5 (lima) dari 18 (delapan belas) industri pemegang PBPHH skala kecil yang telah bersertifikat legal. Banyaknya industri yang tidak berizin dan beberapa PBPHH yang belum taat aturan menjadi tantangan dalam tata kelola hutan di DIY. Strategi implementasi SVLK diprioritaskan pada optimalisasi program Pengadaan Barang dan Jasa Berkelanjutan, optimalisasi SI-KARYO, monitoring dan evaluasi penugasan ganis, serta inventarisasi industri pengolahan kayu yang belum berizin.

Kata Kunci: SVLK, PBPHH, Industri Skala Kecil, Strategi Implementasi

*IMPLEMENTATION OF TIMBER LEGALITY VERIFICATION SYSTEM ON
SMALL-SCALE FOREST PRODUCT PROCESSING BUSINESS LICENSING
(PBPHH) IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA*

Amanda Syifa Widiyanti¹, Teguh Yuwono²

ABSTRACT

The Legality and Sustainability Verification System (SVLK) is a system to ensure the credibility of Forest Product Legality Assurance. The SVLK regulation has met eight changes since 2009, which has affected the implementation of the policy. Small-scale industries as one of the targets of the policy still experience obstacles in implementing SVLK. The Special Region of Yogyakarta (DIY) is one of the provinces producing community wood with many wood processing industries. However, the number of SVLK implementations in small-scale industries is still relatively low. A study related to the implementation of SVLK was conducted as a reference in efforts to improve forest governance in DIY.

This study uses a qualitative approach to supporting data obtained through in-depth interviews and documentation studies. Descriptive qualitative analysis is used to describe the conditions faced by small-scale industries and to examine the implementation of SVLK in DIY. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) analysis was conducted to formulate a strategy for implementing SVLK in PBPHH holding industries with a capacity under 2,000 m³/year in DIY.

Research shows that the implementation of SVLK in small-scale industries is influenced by the motivation of business actors and the market entered. Small-scale industry has a fluctuating business, so it still faces economic constraints. Business actors need to produce efficiently to be able to carry out certification sustainably. In 2024, there were 5 (five) out of 18 (eighteen) small-scale PBPHH holding industries that had been legally certified. The large number of unlicensed industries and several PBPHHs that have not complied with the rules are challenges in forest governance in DIY. The SVLK implementation strategy is prioritized on optimizing the Sustainable Procurement of Goods and Services program, optimizing SI-KARYO, monitoring and evaluating Ganis assignments, and inventorying unlicensed wood processing industries.

Keywords: SVLK, PBPHH, Small-scale Industry, Implementation Strategy

¹ Student of Faculty of Forestry UGM

² Lecturer of Faculty of Forestry UGM